



Aktualisasi Nilai-Nilai Pergerakan Kebangsaan Dalam Pendidikan Karakter Bangsa¹

Effendi Wahyono²

1. Pendahuluan

Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari negara penjajah, tetapi melalui perjuangan yang melibatkan segenap komponen bangsa. Dalam sejarah dunia, Indonesia merupakan satu dari lima negara di dunia yang memperoleh kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata. Bangsa Indonesia berhasil merebut kemerdekaan dari tangan pemerintah colonial karena memiliki tekad, kegigihan, komitmen, integritas, dan pengorbanan yang besar dari seluruh rakyat Indonesia.

Dua hal yang sering didengungkan oleh para pendiri bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu nation building, dan character building sudah jarang terdengar gemanya dalam pembangunan saat ini. Untuk itu dibutuhkan pembangunan bangsa dan pembentukan karakter sebagai gagasan besar yang telah dicetuskan oleh para pendiri bangsa. Melalui pembangunan bangsa dan pembangunan karakter, para pendiri bangsa memiliki pemahaman, pandangan, dan gerak langkah yang sama untuk membangun bangsa Indonesia guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia berdasarkan azas keadilan.

Selama beberapa dekade, pembangunan bangsa lebih dititikberatkan pada keberhasilan pembangunan fisik. Di satu sisi, diakui bahwa pembangunan tersebut telah menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang, terutama ekonom dan politik. Tetapi di sisi lain, saat ini masih terdapat masalah yang menuntut perhatian serius, terutama ketimpangan dan

¹ Disajikan pada Seminar Pendidikan “Aktualisasi Nilai-nilai Perjuangan Kebangsaan dalam Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa” Universitas Airlangga, Surabaya, 29 April 2014.

² Lektor Kepala pada Fisip UT, Kepala Pusat Layanan Pustaka UT, dapat dihubungi melalui email: effendi@ut.ac.id

ketidakadilan dari aspek-aspek tersebut serta pengaruh globalisasi yang menyebabkan memudarnya nilai-nilai perjuangan bangsa dan lemahnya karakter bangsa.

Nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia digali oleh para pendiri bangsa dari berbagai pengalaman historis sejak masa kerajaan-kerajaan nusantara yang mencerminkan kejayaan bahari, antara lain Sriwijaya, Majapahit, Demak, Ternate Tidore, dan Gowa hingga masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pengalaman-pengalaman tersebut telah menimbulkan kesadaran berbangsa yang muncul dari kalangan tokoh-tokoh pergerakan yang mendapatkan pendidikan modern. Mereka putra bangsa Indonesia terpilih dari berbagai etnis, agama, daerah, dan suku bangsa yang bertemu dalam lingkungan akademik di kota-kota besar seperti Batavia (Jakarta), Bandung, Surabaya, dan bahkan di negeri Belanda. Dari pendidikan dan pergaulan yang mereka peroleh, lahirlah kesadaran bahwa mereka adalah satu kesatuan bangsa yang selama ini terjajah. Mereka juga menyadari bahwa kemiskinan dan kebodohan rakyat Indonesia terjadi karena berbagai macam eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial. Sebagai wujud kesadaran tersebut, mereka mendirikan organisasi kepemudaan seperti Boedi Oetomo yang kemudian diikuti organisasi bersifat kedaerahan, misalnya Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain, hingga mengerucut menjadi organisasi kebangsaan yang bernama Indonesia, seperti Perhimpunan Indonesia di Belanda, Indonesische Studieclub di Surabaya, Komite Persatuan Indonesia, Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Sukarno, Partij Indonesia Raya, dan sebagainya. Dari situlah lahir kesadaran pentingnya berkebangsaan dan persatuan kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia merdeka.

Kesadaran itu berkembang menjadi tekad yang berwujud pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, pemuda dan pemudi yang berasal dari berbagai daerah menyatakan komitmennya dengan mengikrarkan diri sebagai satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang bernama Indonesia. Semua pengalaman dan kesadaran tersebut mencapai puncaknya pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Semua itu meresap dalam jiwa para pendiri bangsa, yang kemudian mereka rumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea satu dan dua dinyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah

sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

Pasca proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman yang berasal dari dalam negeri (seperti PKI Madiun, DI TII, dan lainnya) dan luar negeri (seperti kembalinya penjajah Belanda yang membonceng sekutu). Pengalaman perang kemerdekaan tersebut telah meneguhkan semangat perjuangan, kegigihan, solidaritas, persatuan, jujur, dan adil, serta patriotism seluruh bangsa Indonesia. Pengalaman tersebut juga memperkuat kesadaran bahwa mereka adalah satu bangsa yang telah bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pendidikan Pembuka Jendela Dunia

Kebijakan politik liberal yang yang dijalankan oleh pemerintah kolonial sejak paruh kedua abad ke 19 membuka wawasan baru perdagangan dunia. Bagi kalangan industri, Hindia Belanda, khususnya Jawa adalah pasar potensial bagi produk industri mereka. Tetapi pasar potensial ini ternyata tidak memiliki daya beli yang tinggi karena kemiskinannya. Di samping itu, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam mengundang industriawan Eropa untuk berlomba mengeksploitasi sumber alam yang tersimpan di dalamnya, baik perkebunan maupun pertambangan.

Dalam sejarah Indonesia, kita bisa melihat produksi tembakau di pesisir Sumatra Timur yang dimulai tahun 1860 berkembang pesat dan merajai produksi tembakau dunia. Di susul kemudian lada, kopra, kopi, selain gula di Jawa. Memasuki abad ke 20, Indonesia menyumbangkan dua komoditi yang sangat penting dalam perekonomian dunia, yaitu minyak bumi dan karet. Kandungan minyak di Langkat, Sumatra Utara sudah diketahui sejak tahun 1960-an. Namun daerah ini selalu berkecamuk dan tidak ada stabilitas bagi penguasa colonial, karena dirongrong oleh perang Aceh yang sangat menakutkan bagi pemerintahan colonial Belanda. Pada tahun 1883 baru A.J. Zijlker mendapatkan persetujuan pemerintah untuk suatu konsesi dari pangeran langkat. Setelah melalui proses percobaan dengan berbagai permasalahannya seperti masalah personil, keuangan, dan kebakaran sumur pada tahun 1888, akhirnya minyak mengalir dengan menjanjikan. Pada tahun 1900, Zijlker mengekspor minyak

ke kawasan Asia, seperti Cina dan India. Hasil kerja A.J. Zijlker mendorong perusahaan-perusahaan lain tertarik untuk mengeksploitasi kandungan minyak di bumi Indonesia. Ricklefs mencatat sampai tahun 1920 ada kurang lebih 50 perusahaan yang berlomba menyedot minyak bumi yang ada di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Di antara perusahaan-perusahaan itu, yang paling besar adalah Shell (Belanda), yang pada tahun 1930 memproduksi sekitar 85 % dari seluruh produksi minyak bumi Indonesia. Perusahaan lain yang masuk kategori besar adalah Caltex dan Stanvac (Amerika), dan Borneo Oil Company (Jepang) (Ricklefs, 2001: 321-322).

Pembukaan perkebunan maupun pertambangan ini memerlukan tenaga kerja terampil yang bergaji murah. Waktu itu masalahnya adalah penduduk Indonesia secara umum masih buta huruf sehingga tidak mungkin dapat dipekerjakan sebagai tenaga administrasi pada perusahaan-perusahaan perkebunan maupun pertambangan. Untuk tenaga kasar perkebunan di Sumatra Timur perusahaan perkebunan mendatangkan kuli-kuli kontrak dari Jawa dan Cina.

Kebutuhan akan tenaga administrasi yang terampil tersebut mendorong para pengusaha menekan pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk membuka sekolah “bergaya Barat” bagi penduduk pribumi. Ide pembukaan sekolah pribumi “bergaya Barat” ini selain untuk memenuhi kebutuhan tenaga administrasi perusahaan-perusahaan Barat dan birokrasi kolonial, juga dimaksudkan untuk membendung pengaruh pendidikan Islam di pesantren-pesantren. Pemerintah Belanda merasa perlu membendung pengaruh pendidikan Islam karena hampir semua perlawanan (pemberontakan) yang muncul di berbagai wilayah pada abad 19, dipimpin oleh ulama. Masalah kemiskinan, dan buta huruf itulah yang antara lain melatarbelakangi lahirnya kebijakan politik etis, dengan tiga program utama yaitu pendidikan, irigasi, dan transmigrasi.

Meskipun semua pejuang politik etis sepakat bahwa pendidikan merupakan kebijakan strategis untuk membebaskan bangsa Indonesia dari kemiskinan, namun dalam kenyataannya kebijakan ini dilatarbelakangi oleh dua aliran/kepentingan yang saling berlomba, sehingga hasilnya tidak fokus. Aliran pertama diikuti oleh kelompok yang berpendapat bahwa pendidikan hanya diberikan kepada kelompok elit bangsa Indonesia. Bentuk pendidikan bergaya Barat dengan pengantar bahasa Belanda. Kelompok elit berpendidikan model Eropa ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan mengisi birokrasi kolonial yang akan tetap setia dan loyal kepada pemerintah Belanda dapat mengendalikan fanatisme Islam. Snouck Hurgranje dan Abendanon (Direktur Pendidikan 1900-5) termasuk tokoh etis

yang mendukung pandangan ini. Di pihak lain, Idenburg dan Gubernur Jenderal van Heutsz (1904-9) lebih mendukung pendidikan yang lebih mendasar dan praktis. Kelompok ini berpendapat bahwa pendidikan bukan hanya diberikan kepada kalangan atas dan elitis, tetapi juga dibagikan kepada rakyat bawah dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya. Pendekatan yang secara merakyat ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara langsung bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam prakteknya, pemerintah tidak mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai sehingga kedua aliran tersebut tidak dapat menyelenggarakan programnya dengan baik. Pendidikan model eropa sangat mahal sehingga hanya orang-orang kaya dan priyayi tinggi dengan gaji besar yang dapat menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah-sekolah model Barat (Riklefs, 2001: 330). Di samping itu, tidak semua anak bangsa Indonesia yang mengikuti pendidikan gaya Eropa meninggalkan tradisi Islamnya. Meskipun mereka mengikuti pendidikan gaya Eropa, tetapi tetap saja mengikuti pendidikan agama di luar jam sekolah mereka. Mohammad Hatta misalnya, meskipun ia mengikuti pendidikan di MULO, ia tetap mengikuti pendidikan agama yang diikutinya dari ulama yang dihormati di keluarganya (Noer, 1990).

Sekolah yang pertama kali didirikan adalah sekolah Kelas Dua atau yang dikenal dengan sekolah *ongko loro*. Sekolah ini didirikan untuk mendidik calon-calon pegawai renda baik dipemerintahan maupun di swasta. Untuk masyarakat yang strata ekonominya lebih tinggi, seperti pedagang kelas menengah, anak-anak pegawai pemerintah tingkat rendah, disediakan sekolah Kelas Satu. Memasuki abad ke 20, pemerintah mendirikan sekolah desa (*volkschool*), kemudian *vervolkschool* untuk menampung lulusan dari *volkschool*. Sekolah ini secara berangsur-angsur menggantikan sekolah kelas dua. Bagi murid yang luar biaya, dapat melanjutkan ke *Normaal School*, sekolah guru bagi sekolah desa, atau ke *Schakel School* yang berbahasa Belanda. Di samping itu, pemerintah juga mendirikan HIS (Hollandsch Inlandsche School) yang diperuntukan bagi anak-anak priyayi tingkat atas. Lama pendidikan dalam sekolah ini tujuh tahun dengan pengantar bahasa Belanda. Lulusan sekolah ini dapat meneruskan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), sekolah lanjutan pertama, kemudian diteruskan ke AMS (Algemeene Middelbare School), atau ke STOVIA (sekolah dokter Jawa, yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi setingkat sekolah tinggi). Di samping itu, lulusan HIS dapat meneruskan ke jalur Kweekschool dan HIK (Hogere Kweekschool), bagi mereka yang ingin menjadi guru HIS atau kepala sekolah desa. Untuk

anak Eropa atau anak Indonesia yang status sosialnya diakui setingkat dengan golongan Eropa dapat mengikuti pendidikan di ELS. Dari sekolah ini mereka bias meneruskan ke HBS (Hogere Burgerschool), atau ke OSVIA (Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren) atau sekolah calon pegawai bumi putra (Poesponegoro, 1990: 123-127).

Memasuki awal abad 20, jumlah sekolah rendah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda sebesar 601 yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Di samping sekolah-sekolah tersebut, masih ada sekolah-sekolah yang didirikan oleh swasta yang umumnya diperuntukan bagi anak-anak Eropa sebanyak 359 sekolah, dan sekolah-sekolah yang didirikan Missie dan Zending serta sekolah-sekolah swasta milik tokoh-tokoh perjuang seperti Taman Siswa yang jumlahnya mencapai 451 sekolah, sehingga total sekolah yang ada hanya berjumlah 1501 sekolah. Selain jumlahnya sedikit, penyebaran sekolah-sekolah tersebut di beberapa daerah jumlahnya tidak merata. Sebagai contoh untuk wilayah Minahasa yang jumlah penduduknya hanya 450 ribu jumlah sekolahnya mencapai 366 sekolah, masing-masing sekolah pemerintah 115, partikelir 14, dan gereja 237. Sedangkan seluruh wilayah Sulaawesi lainnya jumlahnya tidak lebih dari 20 sekolah (Poesponegoro, 1990: 126).

Sekolah-sekolah menengah secara umum hanya ada di kota-kota besar seperti Jakarta, dan Surabaya. Karena itu bagi putra-putra daerah yang ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat menengah, mereka harus pergi ke Jakarta, yang jauh dari tempat tinggal mereka. Misalnya Mohammad Hatta, setelah lulus ELS, di Bukittinggi, ia meneruskan pendidikannya MULO di kota Padang dalam usia 13 tahun. Dalam usia 17 tahun ia merantau lagi ke kota yang lebih jauh, yaitu Jakarta untuk meneruskan pendidikannya di Prins Henrik Handels (PHS) sekolah dagang yang diikutinya dari tahun 1919-1921. Kemudian ketika usianya mencapai 19 tahun ia pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya (Noer, 1990: 19-37). Di perantauan, mereka hidup bersama teman-temannya dari daerah lain di Indonesia. Mereka membentuk komunitas sebagai intelektual muda yang kemudian menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang terjajah (yang kemudian bernama Indonesia) yang harus berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Kaum intelektual muda tersebut selalu berdiskusi, membahas situasi politik, perlakuan diskriminatif terhadap mereka di sekolah-sekolah mereka, dan gerakan kebangsaan dari berbagai Negara. Meskipun buku-buku jaman itu susah didapat, tetapi semangat membaca yang tinggi di kalangan mereka membuat wawasan mereka, dan kemampuan nalar mereka, melampau usia mereka.

Demikian juga dengan mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda. Mereka bisa bertemu dengan mahasiswa Indonesia lainnya yang berasal dari berbagai daerah. Mereka bahkan dapat bekerja sama dalam suatu organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia (PI). Dalam kepengurusan PI tahun 1923, Iwa Kusumasumantri sebagai ketua, berasal dari Ciamis, Jawa Barat; didampingi J.B. Sitanala sebagai sekretaris yang berasal dari Ambon; bendahara Mohammad Hatta dari Bukitt Tinggi, dan Pemegang arsip Darmawan Mangunkusumo yang berasal dari Purwodadi, Jawa Tengah (Ingleson, 1993 : 6). Di negeri Belanda mereka tidak mengalami perlakuan diskriminatif seperti yang dialami di Hindia Belanda, sehingga mereka merdeka untuk bergaul, mengungkapkan pendapat, dan berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk dengan tokoh-tokoh pergerakan dari berbagai Negara lainnya. Bahkan, Tan Malaka di negeri Belanda pernah ikut berkompetisi untuk duduk dalam parlemen Belanda.

Di antara segelintir pemuda yang luar biasa yang dapat melanjutkan pendidikan sampai ke pendidikan tinggi, masih jauh lebih banyak putra-putra bangsa Indonesia yang tidak dapat mengenyam pendidikan. Pendidikan sangat terbatas jumlahnya, dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menikmatinya. Dengan kecilnya jumlah sekolah dibanding jumlah penduduk tidak heran jika jumlah melek huruf bangsa Indonesia rendah sekali. Berdasarkan data sensus yang ada, pada tahun 1930 jumlah penduduk bangsa Indonesia yang dapat membaca dan menulis hanya 6,44 persen dari 70 juta penduduk. (Poesponegoro, 1990: 124). Angka tersebut menggambarkan betapa beratnya perjuangan kaum intelektual muda bangsa Indonesia untuk mendorong rakyat Indonesia berjuang menjadi bangsa yang merdeka. Perjuangan berat mereka bertambah dengan rendahnya sarana transportasi dan komunikasi. Untuk menyampaikan ide-ide perjuangannya mereka harus pergi ke daerah-daerah dengan menggunakan sarana transportasi ala kadarnya. Sarana komunikasi waktu itu tidak secepat seperti sekarang sehingga mereka harus selalu terjun ke lapangan. Pandangan ini berbeda dengan George T. Cahin (*Nationalism and Revolution in Indonesia*), dan Benedict Anderson (*Jave in a Time of Revolution*), yang berpendapat bahwa jaman kolonial menghasilkan kepemimpinan nasional dan kaum intelektual yang dipisahkan oleh sistem pemerintahan kolonial dari rakyat atau bangsanya sendiri. Dalam pandangan saya, kaum intelektual bangsa Indonesia yang lahir pada awal abad ke 20 sangat mengerti akan bangsa dan rakyatnya. Mereka sangat paham tentang budayanya sendiri karena mereka sangat dekat dengan rakyatnya. Itulah yang membuat mereka dapat menyadarkan rakyatnya yang sebagian besar masih buta huruf

untuk berjuang bersama-sama merebut kemerdekaan, dan mendobrag penindasan yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kolonial.

Tumbuhnya Gerakan Kebangsaan

Pendidikan yang diikuti oleh sebagian kecil rakyat Indonesia telah menumbuhkan rasa kesadaran berkebangsaan. Melalui bacaan mereka dapat mengetahui bagaimana Jepang sebagai negara Asia, dapat mengalahkan Rusia sebagai simbol Barat yang lebih modern dan maju. Mereka juga dapat melihat bagaimana gerakan Turki Muda dalam mewujudkan negara modern. Melalui bacaan, mereka juga dapat mengetahui revolusi Perancis, revolusi industri di Inggris, bahkan di Indonesia sendiri mereka dapat mengetahui bahwa bangsa Indonesia sudah pernah menjadi bangsa yang maju, melalui kejayaan Sriwijaya dan Majapahit. Melalui bacaan, mereka dapat menggali kejayaan masa lalu bangsanya yang kemudian menjadi bodoh, miskin, dan tertinggal karena dijajah oleh bangsa lain. Buku-buku yang dibaca memberikan wawasan dan kesadaran intelektual akan tanggung jawabnya sebagai warga yang terpilih untuk membangkitkan bangsanya dari bangsa yang tertindas menjadi bangsa yang merdeka. Sebagai sarana untuk menggerakkan bangsa Indonesia adalah organisasi. Untuk itulah mereka membentuk organisasi yang dalam sejarah Indonesia disebut organisasi modern karena memiliki landasan hukum, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga. Awal abad ke 20 sejarah Indonesia diramaikan dengan lahirnya berbagai organisasi kebangsaan untuk menampilkan jati diri dan identitasnya sebagai bangsa. Karena itu, dalam sejarah Indonesia, periode ini disebut sebagai periode pergerakan kebangsaan.

Organisasi yang pertama dibentuk adalah Budi Utomo (20 Mei 1908). Organisasi ini pertama kali dibentuk dengan maksud untuk menghimpun dana beasiswa pendidikan bagi kalangan priyayi Jawa. Pendirian organisasi ini dimotori oleh seorang dokter Jawa, Wahidin Sudirohusodo yang resah terhadap sistem pendidikan yang diberikan bagi bangsa Indonesia. Ia kecewa terhadap pengajaran yang ada waktu itu karena di samping jumlah lembaga pendidikan sedikit, biayanya juga mahal yang sulit dijangkau bagi bangsa Indonesia. Sejak tahun 1906 ia mencoba keliling Jawa menemui bupati-bupati membicarakan masalah *studiefonds* bagi bangsa Indonesia khususnya bagi kalangan priyayi Jawa. Usaha itu tidak memberikan hasil, sampai akhirnya ia berkunjung ke STOVIA. Di sekolah ini ia bertemu

dengan dr. Sutomo, yang langsung mendukung usahanya, dan kemudian dikonkretkan dengan pendirian organisasi yang diberi nama Budi utomo (Pringgodigdo, 1986: 1).³

Kelahiran Budi Utomo memberikan inspirasi bagi kalangan intelektual lainnya untuk membentuk organisasi guna mewujudkan visinya. Pada tahun 1909, Tirtoadisuryo, lulusan OSVIA yang seharusnya bekerja pada dinas pemerintahan, mengundurkan diri menjadi ambtenar dan memilih menjadi wartawan, dan mendirikan organisasi yang diberi nama Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia dan kemudian di Bogor (1910). Organisasi ini dimaksudkan untuk membantu pedagang-pegedang Indonesia.⁴ Pada tahun 1911 Tirtoadisuryo mendorong H. Samanhudi, seorang pedagang batik yang sukses di Surakarta untuk mendirikan Sarekat Dagang Islam sebagai suatu usaha koperasi bagi pedagang batik. Usaha ini menarik H.O.S. Cokroaminoto yang juga lulusan OSVIA yang tidak mau bekerja pada dinas pemerintah, untuk mendirikan cabang Sakrekat Dagang Islam di Surabaya. Pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam berganti nama menjadi Sarekat Islam (SI) yang dipimpin oleh Cokroaminoto. Karena kepemimpinan Cokroaminoto yang cemerlang, maka dalam waktu cepat SI berkembang dengan sangat pesat. SI berkembang menjadi organisasi massa dan merupakan organisasi pertama di Indonesia yang memiliki basis rakyat yang memiliki anggota hingga dua juta orang pada tahun 1919 (Riklefs, 2005: 347-348).

Pada tahun yang hampir bersamaan, lahir sebuah partai yang lebih radikal, yaitu Indische Partij (1911) yang dipimpin oleh Douwes Dekker bersama Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Partai ini mengikrarkan nasionalisme untuk bangsa Hindia dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa hindia. Karena sifat dan tuntutan yang radikal, pemerintah Hindia Belanda tidak mengakui keberadaan partai ini. Ketiga pimpinan partai diasingkan ke negeri Belanda.

³ Sutherland menggambarkan bahwa elit baru yang muncul dari hasil pendidikan merupakan ancaman bagi para priyayi lama yang menduduki jabatan karena keturunan. Kebijakan pemerintah kolonial dalam rangka penerapan prinsip-prinsip birokrasi modern, latar belakang pendidikan dan profesionalisme dijadikan dasar dalam pengangkatan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu di pemerintahan (lihat Sutherland, *Terbentuknya sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983). Itulah barangkali yang menyebabkan gagasan Wahidin untuk menghimpun dana beasiswa tidak mendapatkan dukungan dari kalangan pangreh praja.

⁴ Tirtoadisuryo sendiri kemudian sukses dalam bidang jurnalisme. Pada tahun 1903 ia mendirikan *Soenda Berita*, mingguan berbahasa Melayu pertama yang didanai dan dikelola oleh bangsa Indonesia. Di samping itu ia juga mendirikan mingguan *Medan Prijaji* (1907) yang kemudian menjadi harian (1910) yang merupakan surat kabar harian pertama yang dikelola oleh bangsa Indonesia (lihat Riklefs, 2005: 347). Tirtoadisuryo merupakan tokoh yang diangkat dalam novel Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*.

Semangat perjuangan ketiga pimpinan Indische Partij ini tidak pupus meskipun mereka ada di pengasingan. Dengan sistem yang lebih demokratis di negeri Belanda, mereka lebih bebas untuk bergaul dan menyampaikan gagasan-gagasannya. Karena itu kehadiran mereka di Belanda membawa memberi warna baru bagi Perhimpunan Indonesia, organisasi pelajar asal Indonesia di negeri Belanda.

Kesadaran ke-Indonesiaan pun menjadi semakin menguat. Kata “Indonesia” sebagai satu entitas bangsa semakin terasa dan memberikan identitas baru baru putra/putri bangsa Indonesia yang sebelumnya disebut dengan Inlander. Semangat keIndonesiaan semakin jelas setelah Iwa kusumasumnatri memimpin IV. Sebagai ketua baru IV, pada awal januari 1923 Iwa menekankan perjuangan politiknya dalam tiga hal, yaitu, Indonesia harus menentukan nasib sendiri; untuk dapat menentukan nasibnya sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri; selanjutnya ia mengajak seluruh bangsa Indonesia bersatu untuk melawan Belanda. Sebagai ketua IV, Iwapun menyerukan agar para mahasiswa di Belanda terus mengikuti perkembangan politik di tanah air. Dalam sambutannya ketika diangkat menjadi ketua IV, Iwa menyatakan bahwa masa depan bangsa Indonesia semata-mata dan hanya terletak pada kelembagaan dan bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam artian yang sebenarnya. Untuk tujuan tersebut, setiap orang Indonesia harus berjuang sekuat tenaga dengan kemampuan dan kekuatannya sendiri dan bebas dari bantuan asing (Ingleson, 1993: 6-7).

Kegiatan politik IV untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia semakin jelas dengan mengubah nama IV menjadi *Indonesische Vereeniging* (Perhimpunan Indonesia yang disingkat dengan PI) pada tahun 1924, dan mengubah nama majalahnya dari *Hindia Poetra* menjadi *Indonesia Merdeka*. Mulai saat itu, merekapun menyatakan bahwa “Indonesia merdeka” menjadi semboyan pemuda Indonesia. Dengan demikian nama Indie tidak lagi digunakan sebagai nama organisasi pergerakan.

Ingleson mencatat bahwa PI merupakan organisasi nasionalis Asia yang paling awal menuntut kemerdekaan segera dan tidak bersyarat. Radikalisme pemuda nasionalis Indonesia ini oleh Ingleson dilihat sebagai refleksi dari gerakan nasionalis Indonesia. Perjuangan mereka yang radikal dapat dilihat pula dari artikel-artikel yang diterbitkan melalui *Indonesia Merdeka*. Sebuah artikel yang terbit pada Februari 1925, misalnya diberi judul, *Trijd aan Twee Front* (perjuangan di dua front) menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia akan lebih berat

dan lebih pahit tetapi tidak dapat dihindari. Bangsa Indonesia harus bersedia mengorbankan semua daya dan kepandaianya jika ingin mencapai kemerdekaan. Perjuangan bukan hanya satu front, tetapi sekaligus dua front, karena perjuangan mereka tidak hanya melawan pemerintah Belanda, tetapi juga bangsa Indonesia sendiri yang menentang perjuangan kaum nasionalis (Ingleson, 1993: 9, 11). Manifesto politik yang dikumandangkan oleh Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 menunjukkan bahwa gerakan nasionalis semakin jelas merumuskan arahnya. Di dalam manifesto tersebut tercakup prinsip-prinsip nasionalisme seperti kebebasan atau kemerdekaan, kesatuan, dan kesamaan (Kartodirdjo, 1993: xi).

Gerakan radikal dari mahasiswa mempengaruhi gerakan kebangsaan di Indonesia. Organisasi-oranisasi pemuda di Indonesia sejak awal tahun 1920-an mulai intens mengadakan berbagai pertemuan untuk menyatukan langkah guna terwujudnya kemajuan bangsa. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, intensitas hubungan dan keterkaitan satu organisasi dengan organisasi lainnya semakin tinggi. Hal inilah yang mempertebal semangat persatuan dan semangat kebangsaan bagi tokoh-tokoh pemuda waktu itu. Dari risalah kongres beberapa organisasi pemuda waktu itu seperti Jong Java, Jong Sumatra, Jong Islamite Bond, Jong Batak, Pemuda Indonesia, Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia (PPPI), tampak adanya hasrat untuk bersatu. Dari semangat untuk bersatu tersebut, lahirlah gagasan untuk menggelar kongres akbar pemuda Indonesia (Kerapatan Besar Pemuda). Kongres yang kemudian disebut dengan Kongres Pemuda Indonesia I diadakan pada 26 April 1926. Dalam sambutannya sebagai ketua Panitia, M. Tabrani mengatakan "... kita semua orang-orang Jawa, Sumatra, Minahasa, Ambon, dan lain-lain, oleh sejarah dijadikan mahluk yang harus saling mengulur tangan, bilamana kita mencapai apa yang menjadi cita-cita kita semua, yaitu kemerdekaan Indonesia, tanah air yang kita cintai..." (Yayasan Sumpah Pemuda, 1984: 60).

Dari Kongres Pemuda Indonesia I, para pemuda terus menggalang persatuan demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Salah satu pertemuan yang perlu dicatat dalam sejarah Indonesia adalah pertemuan tanggal 23 April 1927 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Jong Java, JSB, Jong Batak, Jong Ambon, Jong Minahasa, Pemuda Indonesia, PPPI yang menghasilkan deklarasi bersama bahwa cita-cita Indonesia merdeka harus menjadi cita-cita semua putra Indonesia; Semua perkumpulan pemuda harus berdaya upaya menuju penyatuan organisasi pemuda dalam satu wadah tunggal (Yayasan Sumpah Pemuda, 1984).

Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia pada masa itu bukan hal yang mudah. Dalam sejarah Indonesia, periode ini adalah periode represif. Pemerintah kolonial mengambil tindakan keras terhadap pemimpin organisasi yang nonkooperatif. Meskipun demikian, tindakan keras yang dilakukan pemerintah kolonial terhadap tokoh-tokoh pemuda dan pergerakan lainnya tidak menyurutkan semangat gerakan anti kolonial. Semakin represif tindakan pemerintah, semakin menggelora pula tuntutan untuk merdeka. Gerakan-gerakan nonkooperatif (tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial) semakin lantang menyuarakan persatuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia (Wahyono, 2013). Hasil konkret pertemuan tersebut adalah diselenggarakannya kongres Pemuda Indonesia ke 2 yang pada tanggal 28 Oktober 1928 berhasil mengeluarkan ikrar bersama yang kita kenal sekarang dengan Sumpah Pemuda. Hasil dari kongres ini adalah ikrar bersama yang kita kenal dengan sumpah pemuda. Di dalam naskah sumpah pemuda itu ada satu kalimat penutup yang selama ini terlupakan, yang berbunyi: "...mengeloearkan kejakinan persatoean Indonesia diperkoeat dengan memperhatikan persatoeannya: kemaoean, sedjarah, hoekoem adat, pendidikan dan kepandoean..." kalimat itu menunjukkan bahwa terbentuknya identitas sebagai bangsa Indonesia karena adanya kesatuan kemauan untuk menjadi bangsa yang merdeka. Perasaan persamaan satu bangsa, tanah air, dan bahasa tersebut kemudian diikuti dengan langkah-langkah konkret untuk menyiapkan Indonesia merdeka.

Kemauan yang tinggi tersebut telah mereka perjuangkan dengan menghantarkan bangsa Indonesia memasuki pintu gerbang kemerdekaan. Ketika pemerintahan Belanda jatuh ke tangan Jepang, gerakan pemuda dan mahasiswa ada yang bergerak dalam bentuk gerakan bawah tanah yang tidak bekerja sama dengan pemerintahan Jepang seperti Sutan Syahrir, ada juga yang bekerja sama secara terbuka dan masuk dalam jajaran pemerintahan Jepang seperti Sukarno dan Hatta. Meskipun demikian mereka selalu berkomunikasi. Jepang memang memberikan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yang direalisasikan dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI, tetapi kejatuhan Jepang yang begitu cepat oleh Sekutu, membuat nasib yang berda dari skenario yang ada. Dalam hitungan jam setelah kejatuhan Jepang, para pemuda berhasil mendesak Sukarno dan Hatta untuk memproklamkan kemerdekaan di luar skenario PPKI. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberikan statu kepercayaan diri bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang sudah direbut tersebut harus

dipertahankan. Karena itulah mereka dengan gigih mempertahankan kemerdekaan yang akan direbut kembali oleh tentara colonial Belanda.

Apa yang dapat dipetik dari perjuangan bangsa Indonesia? Dari perjuangan tersebut, kita dapat melihat beberapa karakter yang dapat dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu semangat kebangsaan, jiwa persatuan, patriotis, pantang menyerah, percaya diri, yang didasarkan pada kejujuran dan toleransi serta rela berkorban. Karakter tersebut yang perlu selalu diaktualisasikan dalam kehidupan kita saat ini. Karena itu lah para pendiri bangsa selalu menekankan perlunya pembangunan karakter di samping pembangunan bangsa.

Perlunya Aktualisasi Nilai-nilai Perjuangan Bangsa dalam Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter sebagaimana yang diimpikan para pendiri bangsa belum berjalan secara optimal. Hal ini antara lain ditandai dengan adanya disorientasi nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya nilai-nilai budaya bangsa, ancaman disintegrasi bangsa, dan melemahnya kemandirian bangsa. Hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan dalam pembangunan selama ini yang lebih mengedepankan pembangunan fisik daripada pembangunan karakter. Kondisi tersebut telah menggerakkan dunia pendidikan untuk melihat kembali bagaimana pentingnya pendidikan karakter (Wahyono, 2011)

Dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk **berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi** manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, **berakhlak mulia**, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 pendidikan karakter ditempatkan sebagai misi pertama dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. Sebagai pelaksanaan dari amanat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut, pemerintah menyusun Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa, yang dimaksudkan sebagai panduan dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pembangunan Karakter Bangsa dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh komponen bangsa (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: i).

Membentuk karakter bangsa tidak mungkin terjadi begitu saja. Untuk mencapai karakter yang diharapkan tersebut, diperlukan pribadi-pribadi yang berkarakter. Pribadi yang berkarakter

sebagaimana yang diungkapkan dalam naskah akademik pendidikan karakter di perguruan tinggi, harus memiliki keterpaduan antara olah hati, olah pikir, olahraga, olah rasa dan karsa. Olah hati berkenaan dengan perasaan sikap dan keyakinan. Karakter yang bersumber pada olah hati ini antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil risiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Olah pikir berkaitan dengan proses nalar guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Karakter yang bersumber dari olah pikir adalah cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif. Olahraga berkenaan dengan proses persepsi dan penciptaan aktivitas secara sportif. Karakter yang bersumber dari olahraga atau kinestika adalah bersih dan sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Olah rasa dan karsa berhubungan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, citra, dan penciptaan kebaruan. Karakter yang bersumber dari olah rasa dan karsa adalah antara lain, berperikemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, rasionalis, peduli, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja (Pemerintah Republik Indonesia, 2010: 21-22).

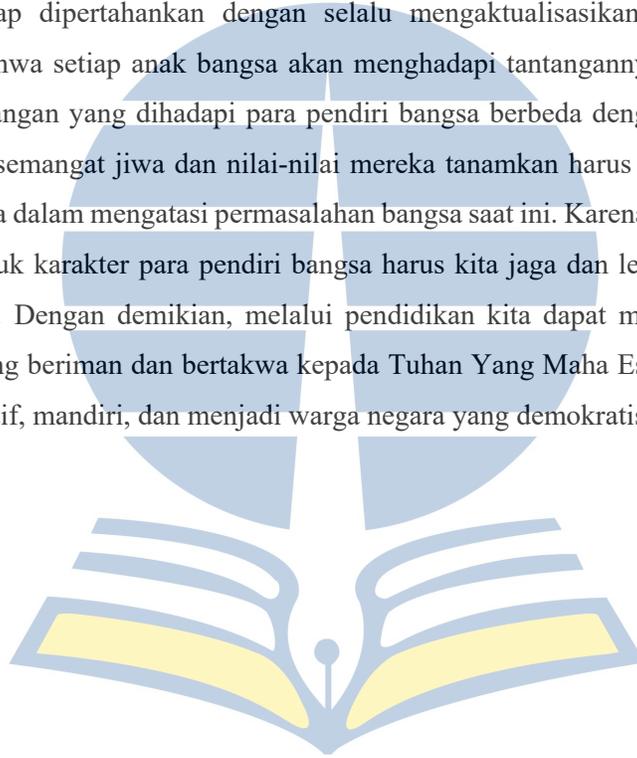
Apa yang saya sampaikan dalam alinea di atas adalah program pemerintah dalam rangka membentuk karakter bangsa Indonesia yang digali dari nilai dan semangat perjuangan bangsa. Program tersebut dengan berbagai inovasinya dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan. Apakah harus dimasukkan dalam mata pelajaran tersendiri? Menurut saya tidak. Nilai-nilai tersebut harus dapat disipkan dalam setiap mata pelajaran. Untuk itu, ketokohan, keteladanan dari setiap pendidik sangat diperlukan. Melalui keteladanan yang diberikan oleh pendidik, peserta didik akan dapat langsung mencontoh nilai-nilai tersebut sehingga akan terinternalisasi dalam kepribadian peserta didik.

Penutup

Pendidikan merupakan wahana perjuangan bangsa Indonesia menemukan dan membentuk identitas diri sebagai bangsa yang bernama Indonesia. Melalui pengetahuan yang dikuasai, pemuda-pemuda Indonesia dapat menggali dan kemudian menarik benang merah perjuangan bangsa untuk dijadikan semangat dalam menggerakkan bangsanya melawan penjajah. Melalui pengetahuan yang

dimiliki, mereka mengetahui bahwa bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang jaya. Tokoh seperti Muhammad Yamin, bahkan merekonstruksi peta wilayah kekuasaan kerajaan Majapahit yang meliputi seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda waktu itu. Kejayaan itu menurun sejalan dengan sistem pemerintahan feodal, yang kemudian tidak dapat bertahan terhadap intervensi dan penaklukan negara penjajah. Karena penjajahan, maka bangsa Indonesia menjadi bangsa yang miskin bodoh, dan terbelakang. Kondisi seperti itu kemudian dijadikan alat perjuangan. Untuk bangkit seperti jaman kejayaan Sriwijaya dan Majapahit Indonesia harus merdeka, karena penjajahan merendahkan harkat kemanusiaan.

Apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia harus tetap dipertahankan dengan selalu mengaktualisasikan nilai-nilai yang mereka wariskan. Diakui bahwa setiap anak bangsa akan menghadapi tantangannya sendiri-sendiri. Artinya tantangan dan perjuangan yang dihadapi para pendiri bangsa berbeda dengan yang dialami generasi kita saat ini. Tetapi semangat jiwa dan nilai-nilai mereka tanamkan harus selalu dijadikan semangat dan inspirasi bagi kita dalam mengatasi permasalahan bangsa saat ini. Karena itu, nilai-nilai perjuangan yang telah membentuk karakter para pendiri bangsa harus kita jaga dan lestarikan, terutama melalui lembaga pendidikan. Dengan demikian, melalui pendidikan kita dapat menjadi manusia Indonesia menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



Daftar Pustaka

- Anderson, B. (1972). *Java in a Time of Revolution, Occupation, and Resistance. 1944-1946*. Itaca: Cornell University Press
- Bertrand, J. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Ingleson, J. (1993). *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*. Jakarta: Grafiti Press.
- Kahin, J. McT. (1952). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, S. (1993). *Pengantar Sejarah Baru: Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kementerian Pendidikan Nasional (2011), *Naskah Akademik Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan tinggi.
- Legge, J.D. (2003). *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan: Peranan Kelompok Sjahrir*. Jakarta: Grafiti.
- Niel, Robert Van. (1960). *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Den Haag: Uitgeverij W. Van Hoeve
- Noer, Delliari (1990). *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES
- Pemerintah RI. (2010). *Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010-2025*. (tanpa penerbit).
- Poeponegoro, J., Notosusanto, N. (1990). *Sejarah Nasional Indonesia Jld V*: Jakarta: Balai Pustaka
- Pringgodigdo, AK (1986). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta
- Sutarno_NS. (2008). *1 Abad Kebangkitan Nasional dan Kebangkitan Perpustakaan*. Jakarta: Sagung Seto
- Sutherland, H. (1979). *The Making of a Bureaucratic Elite*. Singapore; Heinemann Educational Books
- Yayasan Sumpah pemuda. (1984). *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Kunia Esa.
- Wahyono, Effendi (2013). “Aktualisasi Nilai-nilai Sejarah Kebangkitan Nasional”, disampaikan pada orasi ilmiah Wisuda UT Periode I tahun 2013.

Wahyono, Effendi (2011). UT Go Green: Model Pendidikan Karakter, Jakarta: Direktorat Ketenagaan Dikti.

www.id.wikipedia.org/wiki/sejarah_nama_Indonesia

